

Menuju B50: Dapatkah Subsidi Biodiesel Berkelanjutan?

Program B50 menempatkan sawit sebagai pilar utama transisi energi Indonesia. Namun, semakin tinggi tingkat pencampuran biodiesel, semakin besar pula tantangan pembiayaan yang harus dijaga keberlanjutannya. Dalam kondisi produktivitas yang relatif stagnan, kemampuan sektor sawit untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus menjaga ruang ekspor menjadi semakin krusial. Tanpa peningkatan produktivitas, B50 berisiko menghadapi tekanan fiskal dan keterbatasan pasokan di masa depan.

*Selengkapnya di halaman 9

Tekanan Iklim Meningkat, Produktivitas Sawit ikut Tergerus

Perubahan iklim kini mulai dirasakan langsung di tingkat kebun. Suhu yang semakin tinggi, pola hujan yang tidak menentu, serta potensi El Niño pada paruh kedua 2026 menciptakan tekanan baru terhadap produktivitas sawit. Dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun muncul secara bertahap melalui penurunan pembentukan bunga dan hasil panen.

Dalam kondisi ini, tantangan produktivitas tidak hanya ditentukan oleh praktik budidaya, tetapi juga oleh kemampuan industri beradaptasi terhadap perubahan iklim. Tanpa langkah adaptasi yang tepat, tekanan iklim berpotensi menjadi faktor yang secara perlahan menggerus kinerja produksi sawit nasional.

*Selengkapnya di halaman 3

EUDR dan ISPO: Menjaga Akses Pasar Eropa melalui Penguatan Traceability Sawit Indonesia

Penerapan EUDR menandai perubahan besar dalam perdagangan sawit global. Akses pasar tidak lagi hanya ditentukan oleh volume dan harga, tetapi oleh kemampuan pembuktian asal-usul dan keberlanjutan produk. Di tengah tekanan tersebut, penguatan ISPO dan sistem *traceability* menjadi kunci agar sawit Indonesia tetap kompetitif di pasar Eropa. Tanpa pembenahan data dan rantai pasok, sebagian pelaku—terutama *smallholder*—berisiko tertinggal dari standar pasar global yang semakin ketat.

*Selengkapnya di halaman 5



Dr. Darmin Nasution



Dr. Sofyan A. Djalil

Industri sawit Indonesia tengah menghadapi tekanan yang semakin kompleks, baik dari sisi domestik maupun global. Implementasi B50 mendorong kebutuhan pasokan CPO yang lebih besar sekaligus menantang keberlanjutan pembiayaan biodiesel, sementara penerapan EUDR menuntut penguatan *traceability* untuk menjaga akses pasar ekspor ke Uni Eropa. Di sisi lain, perubahan iklim mulai menunjukkan dampak nyata di tingkat kebun, dengan potensi El Niño pada paruh kedua 2026 yang berisiko menekan produktivitas. IPOSS mengajak pembaca menelaah dinamika tersebut dalam membentuk arah industri sawit Indonesia ke depan.

Mengapa Permintaan Sawit Bergeser ke *Global South*



Selama bertahun-tahun, pembahasan mengenai industri sawit sering kali berpusat pada pasar Eropa. Regulasi lingkungan, standar keberlanjutan, hingga isu deforestasi membuat hubungan antara sawit dan Uni Eropa menjadi sorotan utama dalam perdagangan global. Namun jika melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, arah pasar sawit sebenarnya sedang berubah. Permintaan dunia terhadap minyak sawit semakin bergeser ke negara-negara yang sering disebut sebagai *Global South*—yakni negara berkembang di Asia, Timur Tengah, Afrika, dan sebagian Amerika Latin.

Perubahan ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari perubahan ekonomi global yang berlangsung secara bertahap. Negara-negara di kawasan *Global South* kini mengalami pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan peningkatan konsumsi yang jauh lebih cepat dibandingkan negara maju. Dengan populasi yang besar dan kebutuhan pangan yang terus meningkat, permintaan terhadap minyak nabati pun ikut meningkat.

Dalam konteks ini, minyak sawit memiliki posisi yang sangat kompetitif. Dibandingkan minyak nabati lain seperti minyak kedelai atau minyak bunga matahari, sawit umumnya lebih murah dan memiliki produktivitas lahan yang lebih tinggi. Bagi banyak negara berkembang yang sensitif terhadap harga pangan, faktor ini menjadi sangat penting. Sawit menjadi pilihan yang efisien untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng, bahan baku makanan olahan, hingga industri kosmetik.

India adalah contoh paling jelas dari pergeseran ini. Negara tersebut saat ini merupakan importir minyak sawit terbesar di dunia. Dengan populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa, kebutuhan minyak nabati India terus meningkat setiap tahun. Selain India, negara seperti Pakistan, Bangladesh, dan sejumlah

negara di Timur Tengah juga menjadi pasar yang semakin penting bagi ekspor sawit.

Pada saat yang sama, peran pasar Eropa dalam perdagangan sawit justru cenderung menurun. Konsumsi sawit di kawasan tersebut tidak tumbuh secepat wilayah lain, dan berbagai regulasi lingkungan membuat akses pasar menjadi lebih kompleks. Uni Eropa juga berupaya mengurangi penggunaan minyak sawit dalam sektor energi, khususnya untuk biodiesel. Kebijakan ini secara perlahan mengurangi kontribusi Eropa terhadap permintaan global.

Namun menurunnya pangsa pasar Eropa tidak berarti masa depan sawit terancam. Justru sebaliknya, struktur permintaan global menjadi semakin beragam. Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika kini menjadi pusat pertumbuhan konsumsi minyak nabati. Dalam banyak kasus, negara-negara ini lebih fokus pada isu ketahanan pangan dan stabilitas harga dibandingkan pada perdebatan regulasi lingkungan yang dominan di negara maju.

Bagi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia, perubahan ini memiliki implikasi strategis. Diversifikasi pasar menjadi semakin penting agar ekspor tidak bergantung pada satu kawasan saja. Dengan pasar yang semakin luas, industri sawit Indonesia memiliki peluang untuk menyesuaikan strategi perdagangan dan memperkuat posisinya di pasar negara berkembang.

Perubahan peta permintaan global ini menandai fase baru dalam industri sawit. Jika sebelumnya perhatian tertuju pada pasar negara maju, kini dinamika perdagangan semakin ditentukan oleh negara-negara berkembang. Dalam lanskap baru ini, masa depan sawit kemungkinan besar akan semakin dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan pangan di kawasan *Global South*. (JH)

Tekanan Iklim Meningkat, Produktivitas Sawit Ikut Tergerus

Akhir-akhir ini, suhu udara terasa semakin panas. Musim hujan tidak lagi datang tepat waktu, sementara periode kering terasa lebih panjang. Perubahan ini bukan sekadar fenomena cuaca biasa, melainkan bagian dari perubahan iklim yang dipicu oleh peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer.

Namun, yang sering luput disadari, perubahan ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan manusia—tetapi juga secara langsung memengaruhi produktivitas kelapa sawit.

Tanaman sawit sangat bergantung pada kondisi iklim yang stabil. Ketika suhu meningkat dan pola hujan menjadi tidak menentu, tanaman mengalami stres fisiologis. Proses fotosintesis menurun, pembentukan bunga terganggu, dan pada akhirnya berdampak pada penurunan jumlah serta kualitas Tandan Buah Segar (TBS).

Dalam jangka pendek, dampaknya mungkin tidak langsung terlihat. Namun dalam jangka menengah, tekanan iklim ini dapat menggerus produktivitas secara bertahap. Fenomena seperti El Niño menjadi contoh nyata, di mana kekeringan berkepanjangan dapat menekan produksi sawit secara signifikan.

Pada periode El Niño 2015–2016, produksi minyak sawit Indonesia dilaporkan turun kisaran 3–4 juta ton akibat kekeringan yang berkepanjangan (USDA, 2016). Siklus serupa kembali terjadi pada El Niño 2023–2024 yang memicu penurunan curah hujan di berbagai wilayah sentra sawit. Sejumlah analis memperkirakan dampaknya terhadap produksi baru mulai terasa pada 2024 hingga 2025, mengingat tanaman sawit memiliki respons yang tertunda terhadap stres iklim.

Memasuki Q3 2026, kondisi iklim di Indonesia mulai bergeser dari periode yang relatif basah ke arah yang lebih kering, dengan potensi mengarah ke kondisi El Niño pada paruh kedua tahun ini (dikutip dari IPOSS). Bagi industri sawit, perubahan ini penting karena dampaknya tidak langsung terlihat, tetapi akan mulai terasa secara bertahap pada akhir 2026 dan menjadi lebih jelas pada tahun berikutnya.

Karakter tanaman sawit sebagai tanaman tahunan membuat dampak ini sering kali tidak disadari sejak awal. Respons terhadap stres iklim dapat muncul dengan jeda waktu, sehingga penurunan produktivitas yang terjadi hari ini bisa jadi merupakan dampak dari kondisi iklim pada periode sebelumnya.



Tekanan ini tidak berdiri sendiri. Praktik budidaya yang belum efisien dapat memperbesar dampaknya, salah satunya melalui penggunaan pupuk nitrogen yang tinggi. Selain meningkatkan biaya produksi, pupuk nitrogen juga berkontribusi terhadap emisi N_2O —gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan. Studi Chen et al. (2024) di Jambi mencatat emisi sekitar 3.010 kg CO_2 -eq per hektare per tahun, dengan lebih dari separuhnya berasal dari N_2O .

Dalam kondisi kering, efektivitas pemupukan juga cenderung menurun karena tanaman tidak mampu menyerap nutrisi secara optimal. Akibatnya, tambahan pupuk tidak selalu meningkatkan hasil, bahkan berpotensi menambah biaya dan emisi jika tidak dikelola dengan tepat.

Situasi ini membentuk semacam lingkaran umpan balik. Ketika emisi meningkat, tekanan iklim semakin besar. Namun saat produktivitas menurun, respons yang sering diambil justru meningkatkan input, termasuk pupuk, yang pada akhirnya kembali menambah emisi.

Di sinilah tantangan sekaligus peluang muncul. Upaya seperti pengelolaan air di lahan gambut (*rewetting*), pemupukan yang lebih presisi, hingga pemanfaatan limbah menjadi energi melalui biodigester, bukan hanya langkah mitigasi emisi, tetapi juga strategi menjaga stabilitas produksi.

Dengan kata lain, adaptasi terhadap perubahan iklim bukan lagi sekadar isu keberlanjutan, melainkan bagian dari strategi produktivitas. Industri sawit yang mampu mengelola emisi sekaligus beradaptasi dengan perubahan iklim akan memiliki posisi yang lebih kuat—baik dari sisi produksi maupun daya saing global. (JH)

Pupuk Mikro Jadi Kunci Tersembunyi Dongkrak Produktivitas Sawit Nasional

Produktivitas kelapa sawit nasional masih menghadapi tantangan serius, terutama di tingkat petani rakyat. Di tengah upaya meningkatkan hasil tanpa ekspansi lahan, pupuk mikro mulai dilirik sebagai solusi efektif yang selama ini kurang mendapat perhatian. Berbeda dengan pupuk makro seperti nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K), pupuk mikro mengandung unsur hara esensial dalam jumlah kecil seperti Boron (B), Tembaga (II) Sulfat (CuSO_4), Seng (Zn), Mangan (Mn), dan lain-lain yang berperan penting dalam proses fisiologis tanaman.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kekurangan unsur mikro dapat menjadi faktor pembatas utama produktivitas sawit, khususnya di lahan marginal atau tanah yang sudah mengalami penurunan kesuburan. Pakar tanah dan pupuk dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Prof. Didiek Hadjar Goenadi, menekankan bahwa selama ini petani cenderung hanya fokus pada pupuk makro, padahal keseimbangan nutrisi menjadi kunci optimalisasi hasil.

Dalam praktiknya, isu ini tidak hanya soal menambah pupuk, tetapi bagaimana menjaga keseimbangan kesuburan tanah. Tanah yang terus dipaksa berproduksi tanpa pengelolaan nutrisi yang tepat berisiko mengalami penurunan kualitas dalam jangka panjang.

Data uji lapang PPKS menunjukkan bahwa aplikasi Tembaga (II) Sulfat (CuSO_4) mampu meningkatkan bobot tandan dan total produksi Tandan Buah Segar (TBS). Sementara itu, studi lain menunjukkan bahwa pemberian Boron dapat meningkatkan jumlah bunga betina dan kualitas buah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan hasil panen.

Konteks di lapangan memperkuat urgensi penggunaan pupuk mikro. Menurut data dari Pemkab Belitung Timur, produktivitas petani sawit tercatat hanya sekitar 480 kg TBS per hektare pada 2025 tercatat masih, jauh di bawah potensi optimal yang bisa mencapai 5–6 ton TBS per hektare per tahun. Kondisi tanah yang tergolong tua, miskin bahan organik, dan berpasir membuat tanaman membutuhkan tambahan nutrisi spesifik yang tidak bisa dipenuhi hanya oleh pupuk makro.

Hal ini menunjukkan bahwa tantangan produktivitas bukan semata karena kurangnya input, tetapi juga karena kondisi tanah yang semakin menurun. Dalam jangka panjang, pendekatan yang hanya menambah pupuk tanpa

memperhatikan keseimbangan tanah justru berpotensi mempercepat penurunan kesuburan.

Selain meningkatkan hasil, pupuk mikro juga dinilai lebih efisien secara biaya. Biaya tambahan pupuk mikro relatif kecil dibandingkan potensi peningkatan produksi yang dapat dicapai. Sebagai gambaran, harga pupuk mikro berada di kisaran puluhan hingga ratusan ribu rupiah per kilogram, sehingga secara total biaya aplikasi tetap terbatas. Dalam simulasi sederhana, kenaikan produksi sekitar 500 kg TBS per hektare per tahun dapat menghasilkan tambahan pendapatan signifikan yang jauh melampaui biaya pupuk.

Dengan kebutuhan hanya sekitar 2–5 kg per hektare per tahun, biaya tambahan pupuk mikro relatif kecil, namun mampu meningkatkan produksi hingga puluhan persen. Dalam simulasi sederhana, kenaikan produksi 500 kg per hektare dapat menghasilkan tambahan pendapatan signifikan yang jauh melampaui biaya pupuk.

Meski demikian, Namun di sisi lain, adopsi pupuk mikro masih menghadapi sejumlah kendala. Rendahnya pemahaman petani menjadi faktor utama, diikuti keterbatasan akses dan persepsi biaya tambahan. Banyak petani juga menunggu bukti nyata di lapangan sebelum beralih dari praktik konvensional. Oleh karena itu, pendekatan edukatif melalui penyuluhan, demonstrasi plot, dan pendampingan teknis menjadi krusial.

Dari sisi kebijakan, dukungan pemerintah dalam bentuk insentif atau subsidi pupuk mikro dapat mempercepat adopsi, terutama di wilayah dengan produktivitas rendah. Kolaborasi antara lembaga riset, pemerintah daerah, dan pelaku industri juga diperlukan untuk memastikan distribusi pengetahuan dan teknologi berjalan efektif.

Dengan potensi peningkatan hasil yang signifikan dan biaya yang relatif terjangkau, pupuk mikro dapat menjadi salah satu kunci untuk mendorong produktivitas sawit nasional secara berkelanjutan—tanpa harus membuka lahan baru.

Pada akhirnya, penggunaan pupuk pada tanaman harus juga melihat kondisi tanaman dan lingkungan. Sangat disarankan untuk tidak menggunakan dosis umum, melainkan mengikuti rekomendasi spesifik berdasarkan kondisi kebun melalui analisis tanah atau konsultasi dengan tenaga profesional. Pendekatan ini penting agar peningkatan produktivitas tidak mengorbankan kesehatan tanah dalam jangka panjang. (JH)

EUDR dan ISPO: Menjaga Akses Pasar Eropa melalui Penguatan *Traceability* Sawit Indonesia

European Union Deforestation Regulation (EUDR) menandai perubahan penting dalam perdagangan sawit global. Pasar kini semakin menuntut kejelasan asal-usul produk, legalitas lahan, status deforestasi, serta kemampuan rantai pasok untuk ditelusuri dan dibuktikan. Perdagangan sawit tidak lagi semata bergantung pada volume pasokan dan daya saing harga, tetapi juga pada kualitas sistem pembuktian yang dimiliki negara produsen.

Data BPS menunjukkan tekanan terhadap sawit Indonesia di pasar Eropa sebenarnya sudah berlangsung sejak penerapan Renewable Energy Directive (RED) II pada 2018 dan diperketat melalui RED III. Dalam tujuh tahun terakhir, ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa turun sekitar 9 persen. Volume pasar juga menyusut dari sekitar 7,5 juta ton pada 2018 menjadi 5,7 juta ton pada 2024, lalu turun lagi menjadi sekitar 3,9 juta ton pada 2025. Penurunan terbesar terjadi pada ekspor CPO dan biodiesel, sementara produk oleokimia relatif lebih stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar Eropa semakin selektif terhadap pasokan yang dinilai memiliki risiko lingkungan dan kepatuhan tinggi.

Tekanan tersebut akan semakin besar seiring penerapan EUDR pada 30 Desember 2026 untuk perusahaan besar dan menengah, serta 30 Juni 2027 untuk perusahaan kecil. Regulasi ini mewajibkan komoditas seperti sawit memiliki *traceability*, bukti legalitas, dan dokumen *due diligence* yang dapat diverifikasi hingga titik kebun.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki berbagai regulasi, standar keberlanjutan, dan kelembagaan sawit, termasuk Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Namun, sistem pembuktian dan ketertelusuran sawit nasional masih belum terintegrasi dengan baik dan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pembuktian yang diminta pasar Eropa.

Titik paling rentan berada pada level *smallholder*. Masih banyak pekebun yang belum memiliki koordinat kebun, legalitas lahan yang jelas, maupun pencatatan rantai pasok yang memadai. Ketika akses pasar semakin bergantung pada kualitas data dan *traceability*, *smallholder* menghadapi keterbatasan administrasi, teknologi, dan pembiayaan. Jika

kondisi ini tidak dibenahi, sebagian pekebun berpotensi tersingkir dari rantai pasok ekspor karena tidak mampu memenuhi persyaratan kepatuhan.

ISPO sebenarnya memiliki potensi besar untuk diperkuat sebagai instrumen *due diligence* nasional dalam menghadapi EUDR. Secara substansi, ISPO memiliki kesesuaian dengan Pasal 3 EUDR yang mensyaratkan produk bebas deforestasi setelah Desember 2020, diproduksi sesuai hukum negara asal, dan dilengkapi *due diligence statement*. Namun, audit ISPO saat ini belum secara eksplisit menyatakan bahwa suatu unit usaha memenuhi unsur *deforestation-free* dan *compliance with relevant legislation* sebagaimana terminologi dalam EUDR. Akibatnya, ISPO belum sepenuhnya dipandang sebagai instrumen pembuktian yang kuat di pasar Eropa, meskipun substansinya relatif sejalan.

Penguatan ISPO perlu diarahkan pada aspek *traceability* dan kompatibilitas dengan mekanisme *due diligence* Uni Eropa. Pernyataan terkait pemenuhan Pasal 3 EUDR perlu diintegrasikan secara eksplisit ke dalam format audit dan laporan ISPO. Penguatan legalitas lahan dan pemetaan spasial di tingkat *smallholder* juga perlu dipercepat. Pemerintah juga perlu mendorong peningkatan sertifikasi ISPO melalui penguatan kelembagaan pekebun dan pendampingan yang lebih intensif kepada *smallholder*. Pendekatan kolektif melalui koperasi, kelompok tani, atau pendamping menjadi penting agar pekebun memiliki akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan kepatuhan, termasuk dukungan dari BPDP.

EUDR menjadi ujian mendesak bagi tata kelola sawit Indonesia. Tanpa pembenahan data, *traceability*, dan penguatan ISPO sebagai instrumen pembuktian yang kompatibel dengan EUDR, *smallholder* berisiko semakin tersisih dari rantai pasok ekspor. Karena itu, regulasi ISPO yang telah direvisi dan diperluas cakupannya dari hulu hingga hilir perlu benar-benar diarahkan dan dipastikan dapat menjawab tiga syarat utama EUDR: bebas deforestasi, legal, dan menjadi dokumen *due diligence* yang dapat diverifikasi. (DS)

Pungutan Ekspor Sawit: Antara Instrumen Fiskal dan Daya Saing Industri

Di tengah perdagangan global yang semakin kompetitif, kebijakan sawit Indonesia tidak lagi hanya menjadi urusan komoditas, tetapi juga instrumen fiskal, energi, dan daya saing industri. Produk sawit dan turunannya tetap strategis. Nilai ekspor sawit Indonesia mencapai sekitar US\$41,9 miliar pada 2025, naik 17,91% dari tahun sebelumnya. Memasuki Q2 2026, volume ekspor CPO dan produk turunannya mencapai 6,7 juta ton. Artinya, sawit masih menjadi komoditas ekspor utama sekaligus penopang penting surplus perdagangan Indonesia pada awal tahun.

Namun, penguatan ekspor ini berlangsung bersamaan dengan kenaikan beban pungutan ekspor. Mulai 1 Maret 2026, pemerintah melalui PMK Nomor 9 Tahun 2026 menyesuaikan tarif Pungutan Ekspor (PE) produk sawit melalui BPDP. Untuk CPO, tarif pungutan ditetapkan 12,5% dari HR CPO Kementerian Perdagangan, sementara produk turunan dikenakan tarif dalam beberapa kelompok dengan besaran relatif lebih rendah dibandingkan CPO. BPDP menjelaskan bahwa penyesuaian ini diarahkan untuk mendukung PSR, sarana-prasarana perkebunan, serta penciptaan pasar domestik melalui mandatori biodiesel.

PE sawit tidak dapat dilihat semata sebagai beban fiskal. Instrumen ini telah menjadi sumber pembiayaan agenda strategis nasional, terutama biodiesel. Pada 2024, BPDP mencatat pembayaran insentif biodiesel untuk volume 11,16 juta kiloliter, dengan penghematan devisa sekitar US\$7,8 miliar. Untuk 2025, alokasi biodiesel ditetapkan 15,6 juta kiloliter, terdiri dari 7,55 juta KL untuk sektor PSO yang didanai BPDP dan 8,07 juta KL untuk sektor non-PSO.

Selain menopang biodiesel, PE juga terkait erat dengan strategi hilirisasi industri sawit nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, struktur ekspor sawit Indonesia bergeser dari dominasi produk mentah menuju produk bernilai tambah, seperti *refined palm oil*, oleokimia, dan berbagai turunan lainnya. Per 2025, GAPKI mencatat ekspor sawit Indonesia telah didominasi produk hilir, sedangkan ekspor CPO mentah hanya sekitar 10% dari total ekspor sawit nasional.

Meski demikian, arah kebijakan PE tetap perlu konsisten dengan agenda hilirisasi. Struktur tarif yang terlalu berfokus pada peningkatan penerimaan berisiko mengurangi insentif bagi produk hilir tertentu, terutama ketika selisih tarif antarkelompok produk semakin tipis. Dalam jangka panjang, efektivitas PE ditentukan oleh kemampuannya menciptakan

diferensiasi yang mendorong industri bergerak ke produk bernilai tambah lebih tinggi, bukan sekadar menjaga penerimaan dana sawit.

PE juga berfungsi mendorong penciptaan nilai tambah di pasar domestik. Seiring berkembangnya kapasitas industri hilir nasional, arah kebijakan sawit Indonesia bertahap bergeser dari sekadar eksportir bahan baku menuju penguatan basis industri produk turunan berbasis sawit.

Di sisi lain, PE merupakan bentuk *trade-off*. Di satu sisi, PE menjadi instrumen fiskal yang memungkinkan pemerintah membiayai biodiesel, menjaga serapan domestik CPO, dan mengurangi tekanan impor energi. Di sisi lain, pungutan masuk ke struktur biaya ekspor. Ketika tarif meningkat, harga efektif produk sawit Indonesia di pasar global ikut naik, terutama untuk produk yang sensitif terhadap perbedaan harga.

Dalam pasar global, fleksibilitas kebijakan menjadi penting. Negara importir utama seperti India cenderung menambah atau mengurangi pembelian berdasarkan disparitas harga antar minyak nabati. Artinya, struktur PE yang terlalu rigid dapat mempersempit ruang Indonesia menjaga daya saing produk sawit ketika harga minyak kedelai atau minyak bunga matahari relatif lebih murah.

Karena itu, isu utamanya adalah kalibrasi PE. Tarif yang terlalu rendah dapat mengurangi ruang pembiayaan biodiesel, PSR, dan hilirisasi. Sebaliknya, tarif yang terlalu tinggi dapat menekan margin eksportir, memengaruhi transmisi harga ke Tandan Buah Segar (TBS) petani, dan melemahkan daya saing ekspor. Dengan demikian, desain PE harus semakin adaptif terhadap harga Crude Palm Oil (CPO), kebutuhan pembiayaan biodiesel, stok domestik, serta tekanan kompetisi dari negara produsen lain.

Keberhasilan kebijakan PE tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan keberlanjutan daya saing industri sawit. Saat harga CPO menguat dan margin industri masih besar, pungutan dapat menjadi sumber pembiayaan strategis bagi biodiesel, PSR, dan hilirisasi. Namun, ketika tekanan kompetisi meningkat, struktur PE yang lebih fleksibel diperlukan agar produk sawit Indonesia tetap kompetitif di tengah persaingan minyak nabati global. (AF)

Dari Data ke Kebijakan: Mengapa Tata Kelola Data Sawit Menjadi Kunci Masa Depan

Persoalan utama tata kelola sawit Indonesia hari ini tidak hanya berputar pada produktivitas, legalitas, EUDR, PSR, maupun biodiesel. Di balik seluruh agenda besar tersebut, terdapat satu fondasi yang menentukan kualitas kebijakan, yaitu data. Ketika luas kebun, status lahan, jumlah petani, umur tanaman, hingga ketertelusuran rantai pasok belum terbaca dalam satu sistem yang konsisten, kebijakan sawit berisiko dibangun di atas asumsi berbeda-beda.

Tiga Wajah Fragmentasi Data Sawit

Persoalan data sawit Indonesia tidak hanya tercermin dari perbedaan angka antar lembaga. Setidaknya terdapat tiga dimensi fragmentasi yang muncul secara bersamaan.

Pertama, ketersediaan data yang belum lengkap di sepanjang rantai nilai industri sawit. Di hulu, data jumlah pekebun rakyat, legalitas lahan, umur tanaman, hingga peta plot kebun belum terhimpun secara sistematis. Di tingkat rantai pasok, transaksi Tandan Buah Segar (TBS) antara petani, dealer, dan pabrik juga belum tercatat dalam sistem digital nasional yang terintegrasi. Sementara di hilir, data produksi, perdagangan, dan ekspor produk turunan sawit serta oleokimia masih tersebar di berbagai institusi. Sebagai pembandingan, Malaysia melalui MPOB telah mengembangkan Sawit Intelligent Management System (SIMS) untuk melacak transaksi sawit dari TBS hingga produk akhir.

Kedua, periode pemutakhiran data antar lembaga belum seragam, sehingga data yang digunakan dalam satu kebijakan sering merujuk pada waktu yang berbeda.

Ketiga, pemanfaatan data masih berjalan dalam silo masing-masing lembaga, tanpa rujukan tunggal untuk mendukung keputusan lintas sektor. Akibatnya, angka acuan industri sawit nasional, mulai dari luas perkebunan, jumlah petani, umur tanaman, hingga produksi, kerap berbeda antar lembaga dan belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi industri sawit secara utuh.

Bagaimana Fragmentasi Membatasi Kebijakan

Dampak paling nyata dari fragmentasi data terlihat pada lemahnya pembacaan produksi sawit nasional. Produksi sering hanya dibaca pada level agregat CPO, padahal rantai produksi sawit jauh lebih panjang: mulai dari benih, TBS, rendemen CPO dan *kernel*, produk samping dan limbah, hingga produk turunan seperti *olein*, *stearin*, *fatty acid*, *fatty alcohol*, biodiesel, dan oleokimia lainnya.

Tanpa data produksi yang lengkap dan terintegrasi dari seluruh pabrik kelapa sawit, pemerintah akan kesulitan membaca kapasitas pasokan CPO secara presisi. Akibatnya, kebijakan alokasi CPO untuk biodiesel, pangan seperti minyak goreng, ekspor, dan hilirisasi selalu berisiko menghadapi salah hitung, tumpang tindih kepentingan, dan tekanan pasar yang sulit diantisipasi.

Dengan kata lain, fragmentasi data bukan sekadar persoalan administratif. Ia menjadi hambatan dalam membaca kapasitas produksi nasional dan merumuskan kebijakan sawit yang tepat sasaran.

Momentum Arsitektur Data Sawit Nasional

Persoalan inti tata kelola data sawit bukan semata-mata ketersediaan teknologi, melainkan belum terbentuknya arsitektur kelembagaan yang mampu menyatukan data lintas rantai pasok dan lintas kementerian. Kerangka legal sebenarnya telah tersedia melalui Inisiatif Satu Peta dan Satu Data Indonesia melalui Perpres 39/2019. Namun, yang masih lemah adalah mandat rekonsiliasi: siapa yang berwenang menyatukan, memverifikasi, menetapkan standar, dan menjadikan data sawit sebagai rujukan bersama dalam pengambilan kebijakan.

Dalam konteks ini, wacana pembentukan otoritas sawit nasional menjadi semakin relevan. Rekomendasi Ombudsman RI pada Oktober 2025 maupun usulan dari organisasi lainnya seperti GAPKI dan APKASINDO menjadi semakin menguatkan akan pentingnya lembaga pemerintah yang khusus mengurus sawit, yang mampu mengkoordinasikan kewenangan seluruh K/L yang selama ini menimbulkan tumpang tindih kebijakan di sektor kelapa sawit, termasuk menjalankan fungsi koordinasi, pelayanan perizinan dan rekonsiliasi data.

Karena itu, tata kelola data perlu ditempatkan sebagai mandat utama otoritas sawit nasional, bukan sekadar agenda turunan. Mandat tersebut setidaknya mencakup tiga hal: pembangunan basis data referensial, penetapan standar definisi dan metodologi, serta mekanisme verifikasi data yang dapat dipercaya. Tanpa basis data terintegrasi sebagai rujukan tunggal, lembaga baru sekalipun akan menghadapi kendala yang sama: kebijakan sulit presisi, koordinasi tetap terfragmentasi, dan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global sulit dikonsolidasikan. (FGK)

PSR dan Masa Depan Produktivitas Sawit Indonesia: Ketika Intensifikasi Menjadi Jalan yang Lebih Realistis

Di tengah meningkatnya kebutuhan minyak sawit untuk pangan, energi, dan ekspor, Indonesia menghadapi pertanyaan mendasar: apakah produksi sawit nasional masih dapat terus ditingkatkan melalui ekspansi lahan? Jawabannya semakin jelas: ruang ekspansi makin terbatas, tekanan lingkungan makin kuat, dan biaya pembukaan kebun baru semakin tinggi. Karena itu, masa depan sawit Indonesia tidak lagi terutama ditentukan oleh perluasan areal, melainkan oleh kemampuan meningkatkan produktivitas kebun yang sudah ada.

Dalam konteks tersebut, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi instrumen strategis. Sawit rakyat menguasai sekitar 42% luas lahan sawit nasional, tetapi kontribusinya terhadap produksi baru sekitar 34%. Kesenjangan ini menunjukkan adanya productivity gap yang besar antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Produktivitas CPO sawit rakyat masih relatif rendah, antara lain akibat tanaman tua, penggunaan benih tidak bersertifikat, keterbatasan pemupukan, serta praktik budidaya yang belum optimal.

Namun, pelaksanaan PSR hingga kini masih menghadapi banyak hambatan. Proses administrasi dan verifikasi sering menjadi bottleneck, terutama terkait legalitas lahan, tumpang tindih kawasan, surat keterangan bebas kawasan hutan, bebas HGU, serta kualitas data usulan pekebun. Tidak sedikit pengajuan PSR tertunda bertahun-tahun karena dokumen tidak sinkron, koordinat lahan belum jelas, atau data petani belum sesuai dengan basis data pemerintah.

Padahal, kebutuhan peremajaan sawit rakyat diperkirakan mencapai 1,2–2,0 juta hektare. Sementara capaian PSR selama hampir satu dekade masih di bawah 500 ribu hektare. Jika kondisi ini terus berlangsung, laju penuaan tanaman akan lebih cepat dibandingkan kemampuan program melakukan replanting. Dampaknya bukan hanya menekan produktivitas petani, tetapi juga mengganggu pasokan bahan baku industri sawit nasional.

Karena itu, PSR tidak boleh dipandang sekadar sebagai program bantuan tanam ulang. PSR harus ditempatkan sebagai agenda transformasi sawit rakyat. Program ini perlu dikaitkan dengan penggunaan benih unggul bersertifikat, penerapan *best management practices*, pemupukan tepat, konservasi tanah dan air, penguatan kelembagaan petani, serta pendampingan teknis yang konsisten.

Pemerintah pusat perlu melakukan *debottlenecking* regulasi secara lebih terintegrasi, terutama pada aspek

legalitas lahan dan verifikasi lintas kementerian. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pendampingan pekebun melalui dukungan Dana Bagi Hasil Sawit yang selama ini justru lebih banyak dialokasikan ke infrastruktur dan mengabaikan program PSR. Padahal dibutuhkan dana tersebut khususnya untuk penyiapan dokumen, pemetaan, penguatan kelembagaan, dan percepatan verifikasi. Di sisi lain, perusahaan perkebunan perlu mengambil peran lebih besar dalam kemitraan persiapan PSR, transfer skill dan knowledge, penyediaan bibit unggul, dan jaminan pasar.

PSR juga perlu dihubungkan dengan kerangka kebijakan yang lebih luas, seperti ISPO, RAN KSB, kemitraan perusahaan, penyelesaian sawit rakyat dalam kawasan hutan, serta kewajiban pembinaan pekebun dalam perizinan perkebunan. Tanpa sinkronisasi tersebut, PSR akan tetap berjalan lambat dan tidak mampu mengejar kebutuhan riil di lapangan.

Pada akhirnya, PSR adalah kunci intensifikasi sawit nasional. Jika produksi CPO nasional dapat ditingkatkan tanpa ekspansi lahan, Indonesia akan memiliki ruang yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas minyak goreng, mendukung biodiesel hingga B50, mempertahankan devisa ekspor, dan memperkuat keberlanjutan industri sawit. Karena itu, PSR harus diposisikan sebagai investasi strategis nasional, bukan sekadar program rutin perkebunan rakyat. (DHP)



Menuju B50: Dapatkah Subsidi Biodiesel Berkelanjutan?

Program mandatori B50 yang akan diberlakukan mulai 1 Juli 2026 telah menjadi instrumen utama transisi energi Indonesia dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Namun, semakin tinggi tingkat pencampuran biodiesel, semakin besar pula tantangan pembiayaan yang harus ditanggung untuk menjaga keekonomian program. Dalam kondisi produktivitas sawit yang relatif stagnan, keberlanjutan pembiayaan B50 menjadi semakin rentan terhadap fluktuasi harga global, terutama harga CPO.

Secara umum, mekanisme pembiayaan biodiesel di Indonesia bekerja melalui penutupan selisih harga antara biodiesel dan solar fosil. Harga biodiesel domestik ditentukan berdasarkan harga CPO dan biaya pengolahan, sedangkan harga solar sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Kementerian ESDM menetapkan HIP Biodiesel pada Mei 2026 adalah sebesar Rp14.917 per liter, sementara harga solar yang terbaru ditetapkan berada pada Rp21.336 per liter. Saat ini, HIP biodiesel tercatat lebih rendah dibandingkan HIP Solar, sehingga kebutuhan insentif dari BPDP relatif tidak ada.

Namun, kondisi ini tidak dapat dianggap permanen. Keekonomian biodiesel sangat dipengaruhi oleh pergerakan dua variabel utama: harga CPO sebagai bahan baku biodiesel dan harga minyak mentah dunia sebagai pembentuk harga solar. Ketika harga CPO meningkat sementara harga minyak dunia melemah, selisih harga antara biodiesel dan solar dapat kembali melebar dan menimbulkan kebutuhan insentif.

Dalam kondisi tersebut, keberlanjutan pembiayaan B50 tidak cukup hanya dilihat dari besaran selisih harga, tetapi juga dari kemampuan sektor sawit menghasilkan produksi dan ekspor yang memadai sebagai basis pungutan ekspor. Jika volume ekspor melemah akibat meningkatnya serapan domestik untuk biodiesel, sementara produktivitas nasional tidak naik, maka ruang pembiayaan BPDP akan semakin terbatas. Karena itu, produktivitas sawit menjadi variabel kunci dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan B50.

Karena itu, keberlanjutan B50 tidak hanya ditentukan oleh besarnya selisih harga antara HIP Biodiesel dan HIP Solar, tetapi juga oleh kemampuan sektor sawit nasional meningkatkan produktivitas. Produktivitas menjadi kunci ganda: memastikan ketersediaan pasokan CPO bagi kebutuhan biodiesel, sekaligus menjaga ruang ekspor sebagai sumber pungutan ekspor untuk membiayai program biodiesel itu sendiri.

Produktivitas nasional yang saat ini sekitar 3,6 ton CPO/ha perlu ditingkatkan secara bertahap agar B50 dapat dibiayai secara lebih mandiri melalui pungutan ekspor. Berdasarkan

hasil perhitungan, apabila selisih harga HIP Biodiesel–HIP Solar mencapai Rp4.000 per liter, dibutuhkan ekspor sekitar 31 juta ton CPO dan turunannya, dengan total produksi CPO sekitar 61 juta ton per tahun. Artinya, dengan luas lahan yang ada, produktivitas nasional idealnya perlu meningkat hingga sekitar 4,7 ton CPO/ha.

Dalam paradigma ini, PSR, benih unggul, GAP, pemupukan berimbang, dan pendampingan petani bukan sekadar agenda teknis perkebunan, melainkan bagian dari strategi pembiayaan B50. Produktivitas sawit menjadi benchmark fiskal dan energi untuk menjaga B50 tetap berkelanjutan tanpa mendorong ekspansi lahan baru.

Program PSR, penggunaan benih unggul, intensifikasi lahan, dan perbaikan tata kelola produksi dapat membantu menurunkan biaya produksi CPO dalam jangka panjang. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan blending yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika harga global dan kemampuan pembiayaan biodiesel oleh BPDP. Dalam situasi harga minyak rendah atau harga CPO terlalu tinggi, penyesuaian target blending dapat menjadi instrumen untuk menjaga keberlanjutan fiskal program biodiesel.

Pada akhirnya, keberhasilan implementasi B50 tidak hanya ditentukan oleh kemampuan meningkatkan kadar campuran biodiesel, tetapi juga oleh kemampuan menciptakan sistem pembiayaan yang tahan terhadap volatilitas pasar global. Tanpa peningkatan produktivitas dan reformasi kebijakan yang adaptif, program B50 berisiko menghadapi tekanan fiskal yang semakin besar di masa depan. (RFY)



Bukan Sekadar Go or No Go: Produktivitas Sawit Syarat B50 Stabil

Proyeksi IPOSS dalam Outlook Industri Kelapa Sawit Q2 2026 menempatkan produksi CPO dan CPKO kumulatif hingga akhir Q2 2026 pada kisaran 23,7 juta ton, sedikit di bawah realisasi periode yang sama tahun 2025 sebesar 24,0 juta ton. Secara tahunan, produksi 2026 diproyeksikan turun dari 2025 menjadi sekitar 50,5 juta ton dengan memperhitungkan faktor cuaca.

Ambisi implementasi B50 menempatkan satu pertanyaan mendasar: seberapa realistis peningkatan produksi CPO hingga 60 juta ton tanpa ekspansi lahan, dan apakah ekosistem pekebun Indonesia benar-benar siap untuk itu?

Jawaban atas pertanyaan tersebut sebagian besar bergantung pada kinerja segmen perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat kini menguasai sekitar 42% total luas areal sawit nasional, namun hanya menyumbang 34% produksi CPO. Sebaliknya, perkebunan besar dengan 58% areal berkontribusi pada 66% produksi. Disparitas ini adalah indikator struktural yang tegas: segmen rakyat menyimpan ruang intensifikasi terbesar sekaligus tantangan implementasi yang paling kompleks.

Instrumen utama untuk menjawab tantangan tersebut adalah Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Namun kondisinya hingga Q2 2026 justru mencerminkan kesenjangan yang dalam antara potensi dan realisasi. Capaian rekomendasi teknis (rekomtek) diperkirakan hanya 18–20 ribu hektare, atau sekitar 36–40% dari target Semester I sebesar 50 ribu hektare. Paradoksnya, hambatan utama bukan minimnya permintaan usulan yang masuk hingga Februari 2026 telah melampaui 109 ribu hektare melainkan kapasitas sistem verifikasi yang belum mampu mengonversi usulan menjadi rekomtek secara efektif.

Setidaknya empat hambatan struktural menghambat laju intensifikasi. Pertama, penggunaan benih ilegal. Praktik ini masih terjadi di sejumlah sentra produksi rakyat dan menekan potensi hasil sejak fase vegetatif. Tanpa jaminan ketersediaan benih bersertifikat yang terjangkau dan merata, intensifikasi hanya akan menjadi retorika agronomis.

Kedua, sebagian besar areal kebun rakyat masih terbelit permasalahan tumpang tindih kawasan hutan atau ketiadaan dokumen legalitas yang sah, yang secara administratif menutup akses pembiayaan program termasuk PSR.

Ketiga, penerapan Good Agriculture Practices (GAP) yang sub-optimal mencakup pemupukan berimbang, pengendalian

hama terpadu, dan manajemen panen merupakan faktor penekan produktivitas yang paling dapat diintervensi jangka pendek, namun menuntut kapasitas penyuluhan yang memadai. Keempat, koordinasi kelembagaan antara BPDP, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu mendorong akselerasi program temuan IPOSS melalui Focus Group Discussion (FGD) dan survei lapangan menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi lintas lembaga justru menciptakan hambatan birokrasi yang kontraproduktif bagi pekebun.

PSR secara konseptual merupakan instrumen intensifikasi yang paling relevan, namun secara implementasi masih jauh dari optimal. Capaian historis PSR hanya sekitar 30% dari total akumulasi target sejak 2016. Sejumlah permasalahan krusial terus menghambat: permohonan yang terkendala dokumen tidak lengkap, minimnya partisipasi aktif pekebun, dan tidak adanya lembaga terpusat yang secara konsisten mengawal implementasi dari tahap pengajuan hingga monitoring pasca-tanam.

Dari sisi kelayakan usaha, pekebun rakyat menghadapi tekanan ganda: biaya peremajaan yang tinggi di satu sisi, dan jeda produktif selama 4–5 tahun pasca-replanting di sisi lain. Tanpa skema pembiayaan yang adaptif dan pendampingan kemitraan yang efektif sebagaimana model PIS-AGRO atau PIR-Trans program PSR akan terus berjalan di bawah kapasitasnya.

Jadi, untuk peningkatan produktivitas sawit nasional, jawabannya bukan lagi berada di antara dilema “go or no go”, melainkan sudah saatnya go. Tidak ada pilihan lain yang lebih realistis bagi sawit Indonesia selain menaikkan produktivitas kebun yang sudah ada. Jika peningkatan produktivitas membutuhkan biaya lebih besar untuk penerapan GAP, pendampingan petani, benih unggul, pemupukan, dan penguatan kelembagaan, maka biaya tersebut harus dipandang sebagai investasi strategis, bukan beban tambahan.

Kesadaran ini harus dimiliki oleh seluruh pelaku industri, baik petani sawit rakyat maupun perusahaan perkebunan. Produktivitas tidak akan naik hanya dengan target dan imbauan, tetapi melalui keberanian untuk membiayai, mendampingi, dan mengubah praktik budidaya di lapangan. Tanpa langkah tersebut, sawit Indonesia akan terus terjebak pada kebutuhan produksi yang meningkat, sementara ruang ekspansi semakin terbatas. (SN)

Menjaga Sawit Tanpa Ekspansi: Antara Tekanan Lingkungan dan Kebutuhan Produksi

Tekanan global terhadap deforestasi kian mengkristal menjadi hambatan dagang yang konkret. EU Deforestation Regulation (EUDR) yang berlaku efektif pada akhir 2026, kerangka RED II, hingga tuntutan ketertelusuran rantai pasok menempatkan ekspansi lahan sebagai opsi yang tidak lagi tersedia, baik secara politik, ekonomi, maupun reputasi. Di dalam negeri, permintaan justru memuncak: konsumsi domestik minyak sawit diproyeksikan menembus 27,67 juta ton pada 2026, ditopang mandatori B40 yang akan ditingkatkan menjadi B50 pada Juli 2026.

Peluang peningkatan produksi sawit Indonesia kini semakin menyempit. Di satu sisi, ekspansi lahan tidak lagi mudah dilakukan karena tekanan regulasi, lingkungan, dan tata kelola lahan. Di sisi lain, upaya intensifikasi juga masih tertahan oleh berbagai persoalan struktural. Luas perkebunan sawit nasional relatif stagnan di kisaran 16,8 juta hektare sejak 2021, sementara produksi minyak sawit sekitar 51,4 juta ton pada 2025 dan diperkirakan menghadapi tekanan pada 2026 akibat cekaman iklim seperti El Nino.

Di tengah keterbatasan tersebut, persoalan paling mendasar justru terletak pada produktivitas. Selama satu dekade terakhir, produktivitas nasional praktis berjalan di tempat, dari sekitar 3,6 ton/ha pada 2015 menjadi sekitar 3,5 ton/ha pada 2025. Padahal, potensi produktivitas CPO dari benih unggul dapat mencapai 7–8 ton/ha, sehingga masih terdapat kesenjangan produktivitas yang besar.

Untuk itu, diperlukan opsi intensifikasi yang saling memperkuat. Setidaknya terdapat lima dimensi yang saling melengkapi: (i) PSR untuk mengganti kebun tua dan bibit non-tenera; (ii) penerapan Best Management Practices (BMP) berupa pemupukan berimbang berbasis analisis daun dan tanah, pengendalian hama terpadu, serta pruning yang disiplin; (iii) adopsi bibit unggul tersertifikasi; (iv) mekanisasi panen dan efektifitas transportasi TBS untuk menekan losses; serta (v) agronomi presisi berbasis *drone*, sensor, dan *geo-traceability* yang sejalan dengan kepatuhan EUDR.

Namun, implementasi di lapangan mengalami berbagai hambatan. Hingga Februari 2026, realisasi PSR baru mencapai 418 ribu hektare, masih jauh target 2 juta ha lahan sawit tua dan kurang produktif yang perlu diremajakan. Hambatan utamanya masih berkisar pada sulitnya penyelesaian status lahan sawit rakyat di kawasan hutan dan kepastian bahwa lahan tersebut bebas dari tumpang tindih konsesi HGU.

Persoalan semakin rumit akibat terbatasnya SDM pendamping di lapangan, lemahnya kelembagaan pekebun,

serta rendahnya kapasitas administrasi dan teknis kelompok tani dalam mengurus PSR.

Pengalaman negara produsen lain menunjukkan bahwa intensifikasi bukanlah agenda utopis. Malaysia, Thailand, dan Kolombia mulai mengarahkan strategi produksi pada peremajaan tanaman, varietas unggul, mekanisasi, dan efisiensi budidaya ketika ruang ekspansi semakin terbatas. Arah ini mempertegas bahwa masa depan sawit tidak lagi ditentukan oleh perluasan lahan, tetapi oleh kemampuan meningkatkan produktivitas kebun yang sudah ada.

Dengan demikian, implikasi kebijakannya harus jelas dan realistis. Percepatan PSR perlu diarahkan pada laju sekitar 3–4% per tahun dari total kebun rakyat, atau setara kurang lebih 180 ribu hektare per tahun. Namun, percepatan ini harus didahului oleh penyelesaian hambatan legalitas lahan, terutama yang berkaitan dengan kawasan hutan, melalui mekanisme tim terpadu di Kementerian Kehutanan.

Di saat yang sama, dana bagi hasil sawit perlu diperkuat sebagai instrumen pendampingan petani melalui revisi PMK No. 10 Tahun 2026. Alokasinya sebaiknya tidak hanya diarahkan untuk infrastruktur, tetapi juga untuk penguatan kelembagaan kelompok tani, perbaikan kualitas data usulan PSR, dan pemetaan lahan sawit rakyat. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB) juga perlu diarahkan untuk mendukung percepatan PSR. Dengan cara ini, peningkatan produksi nasional dapat ditempuh melalui intensifikasi yang lebih terukur, bukan melalui ekspansi lahan baru.

Menjaga sawit tanpa ekspansi hanya mungkin dilakukan jika Indonesia berani menempatkan intensifikasi sebagai agenda utama industri sawit nasional. Ketika tekanan lingkungan global semakin membatasi pembukaan lahan baru, sementara kebutuhan produksi terus meningkat untuk pangan, energi, dan industri, intensifikasi menjadi satu-satunya jalan realistis untuk menjaga keberlanjutan sekaligus kapasitas produksi nasional.

Karena itu, PSR, penggunaan bibit unggul, penerapan BMP, mekanisasi, penguatan data, pendampingan petani, dan *geo-traceability* tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Seluruhnya harus diperlakukan sebagai satu paket transformasi produktivitas. Tanpa langkah cepat dan terukur, Indonesia akan menghadapi tekanan ganda: ruang ekspansi semakin sempit, tetapi produktivitas kebun eksisting juga gagal meningkat. Di titik inilah masa depan sawit Indonesia ditentukan. (MA)

Minyak Goreng, Distribusi, dan Ilusi Kelangkaan: Menemukan Riil di Lapangan

Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 58 persen pangsa global. Produksi crude palm oil (CPO) nasional juga diekspektasikan terus meningkat. Data IPOSS menunjukkan produksi minyak sawit Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 51,4 juta ton, sementara ekspor sawit dan turunannya tetap tinggi. Namun di tengah posisi tersebut, masyarakat Indonesia masih berulang kali menghadapi kelangkaan minyak goreng, mulai dari rak ritel kosong hingga lonjakan harga di pasar tradisional. Paradoks inilah yang menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin negara penghasil sawit terbesar dunia justru mengalami persoalan minyak goreng?

Selama ini, kelangkaan minyak goreng sering dipahami sebagai tanda bahwa Indonesia kekurangan bahan baku sawit atau mengalami penurunan produksi. Padahal, persoalan utamanya tidak sepenuhnya berada di sektor hulu. Produksi CPO nasional relatif melimpah dan jauh di atas kebutuhan domestik. Namun dalam banyak kasus, stok yang tersedia tidak terdistribusi secara merata sehingga masyarakat tetap kesulitan memperoleh minyak goreng. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan minyak goreng lebih banyak berkaitan dengan tata niaga dan distribusi dibanding keterbatasan pasokan bahan baku.

Persoalan tersebut semakin kompleks karena struktur distribusi minyak goreng di Indonesia tidak tunggal, melainkan terdiri atas beberapa jalur yang berjalan bersamaan. Pasokan ke waralaba besar umumnya menempuh jalur yang lebih pendek dan terintegrasi langsung dengan produsen, sementara distribusi ke pasar rakyat lebih sering melalui rantai panjang lewat distributor, subdistributor, agen, hingga pengecer. Dalam skema minyak goreng rakyat, distribusi juga melibatkan BUMN pangan seperti Bulog dan ID FOOD sebagai Distributor Lini 1, meskipun penyalurannya terbatas pada pasar rakyat dan pasar tradisional tertentu.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan minyak goreng bukan semata soal panjangnya rantai distribusi, melainkan banyaknya kanal distribusi yang diawasi secara tidak merata. Pengalaman krisis minyak goreng 2022 memperlihatkan bahwa ketika pengawasan lemah, muncul penimbunan, pengalihan barang, panic buying, hingga praktik bundling di tingkat distributor sehingga stok yang tersedia secara nasional tidak selalu sampai ke konsumen dengan harga terjangkau.

Dalam situasi tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk menjaga pasokan domestik dan menahan lonjakan harga. Melalui kebijakan ini, produsen

diwajibkan mengalokasikan sebagian produksi sawit untuk kebutuhan dalam negeri sebelum memperoleh izin ekspor, sementara harga domestik ditetapkan melalui mekanisme HET. Secara prinsip, kebijakan ini penting untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, terutama ketika harga CPO global melonjak.

Namun, implementasi DMO dan DPO tetap perlu ditempatkan dalam desain kebijakan yang proporsional. Bagi industri, kewajiban memasok pasar domestik pada harga tertentu dapat dipahami sebagai bagian dari dukungan terhadap upaya menjaga keterjangkauan minyak goreng. Namun ketika harga CPO global meningkat tajam, selisih antara harga domestik dan harga ekspor menciptakan biaya penyesuaian yang harus ditanggung industri. Karena itu, kebijakan DMO/DPO idealnya dijalankan secara adaptif, transparan, dan memberi ruang kompromi yang seimbang agar kebutuhan konsumen tetap terlindungi tanpa mengganggu keberlanjutan usaha dan daya saing industri.

Karena itu, persoalan minyak goreng tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperketat distribusi atau menerapkan DMO secara permanen. Ketika harga CPO global melonjak, DMO tetap diperlukan untuk menjamin pasokan domestik. Namun saat harga kembali normal dan stok mencukupi, kewajiban tersebut perlu dilonggarkan agar tidak membebani industri secara berkepanjangan. Evaluasi DMO/DPO juga perlu mempertimbangkan harga bahan baku CPO, biaya produksi, serta margin usaha yang wajar agar kebutuhan konsumen tetap terlindungi tanpa seluruh beban stabilisasi ditanggung oleh satu mata rantai usaha.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan distribusi dan transparansi rantai pasok agar intervensi kebijakan benar-benar tepat sasaran. Selama distribusi masih tidak transparan, kenaikan beban industri melalui DMO belum tentu berujung pada harga yang lebih murah di tingkat konsumen. Pada akhirnya, masalah minyak goreng di Indonesia bukan semata persoalan kurangnya bahan baku, melainkan soal bagaimana negara mengelola distribusi dan merancang kebijakan yang adil bagi konsumen maupun pelaku usaha. (FZN)

IPOSS INSIGHTS

Pembina: **Darmin Nasution, Sofyan Djalil**, Pemimpin Umum: **Nanang Hendarsah**, Pemred: **M. Rumi Djalil**, Redaktur: **Dimas HP**, Staf Redaksi: **Dwivayani, Faridl, Raisya, Aura, Sylvia, Jennifer, Alya, Fikri**, Desain: **Denis**

Sahid Sudirman Center, Lt 16
Jl Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220
email: info@iposs.co.id